



editorial

KEBIJAKAN INOVASI INKLUSIF DEMI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Kebijakan yang berbasis inovasi telah dituangkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, pada poin tujuan kesembilan yaitu “Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi”. Hal ini dilakukan melalui dorongan terhadap industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara berkembang, serta mendorong kebijakan yang berorientasi pada *evidence based* (berdasarkan bukti dari penelitian ilmiah). Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dicapai juga dengan mendorong inovasi secara substantif, meningkatkan jumlah riset dan tenaga pembangunan per 1 juta orang dan juga riset publik dan swasta.

Sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan pada umumnya berupa Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Dye 2013). Kebijakan merupakan hasil dari kompromi dan kolaborasi atas berbagai alternatif dan gagasan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Manar (2018), instrumen yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut meliputi berbagai aspek, minimal terdapat empat instrumen pokok yang sangat penting, yaitu hukum, tindakan, advokasi dan uang. Instrumen hukum mencakup hasil legislasi, kebijakan, dan peraturan yang menjadi kerangka acuan tindakan kebijakan. Instrumen tindakan berkaitan dengan hal yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan (*service delivery*). Berikutnya instrumen advokasi berupa justifikasi atau argumen kebijakan yang harus disampaikan kepada publik secara persuasif sebagai bentuk pendidikan kepada masyarakat. Poin terakhir yaitu keuangan yang menjadi alat utama dalam mewujudkan instrumen-instrumen lainnya.

Selama beberapa dekade pendekatan kebijakan yang eksklusif mendominasi dengan penerapan yang lebih mementingkan prinsip *pragmatism* jangka pendek serta dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat dangkal dan individualis. Sebaliknya, pergeseran paradigma inklusif lebih berorientasi pada partisipasi publik dalam setiap aspek pembangunan, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban individu, demi terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama dan merata meski dengan latar belakang yang berbeda (Negara, 2013). Lebih jauh lagi, prinsip inklusifitas akan mengakselerasi terciptanya pembangunan yang terbuka, ramah dan meniadakan hambatan hubungan setiap warga negara

karena sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Karena pada prinsipnya, inklusifitas adalah keterlibatan semua pihak dalam proses penyusunan kebijakan dalam pembangunan.

Pada kenyataannya, tuntutan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, menjadikan pemerintah bukan satu-satunya aktor penting dalam pemberdayaan sosial. Menurut Manar (2018) salah satu tantangan pemerintah dalam mewujudkan kebijakan inovasi yang inklusif adalah masih munculnya pola pendekatan *patron-client* yang memandang kelompok lainnya (selain pemerintah) tidak selevel dalam pelaksanaan kebijakan.

Adanya inovasi inklusif yang meliputi inovasi kebijakan, organisasi, model bisnis, alur kerja dan proses riset, diharapkan dapat merespon tantangan aktual masyarakat selama pandemi. Inovasi inklusif tidak hanya berdasarkan pada ilmu sains (*hard science*) tapi juga menyangkut inovasi sosial-humaniora. Melalui pendekatan Penelitian sosial-humaniora, dianggap dapat menghasilkan data ilmiah yang relevan, dapat mengukur risiko dan efek jangka panjang dalam perspektif perekonomian, dapat mengukur sejauh mana penggunaan teknologi, serta dapat mengatasi permasalahan pandemi dan diterima oleh publik secara luas.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat Langkah yang bisa diambil, misalnya melalui *public private partnership* (kemitraan publik dan swasta) dalam mendorong inovasi yang inklusif. Alternatif ini bisa menjadi solusi dalam percepatan pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan. Sudah banyak inovasi inklusif yang diinisiasikan untuk memberikan peluang yang sama bagi masyarakat luas, misalnya, bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam mengatasi permasalahan sosial. Sesuai dengan kutipan dari Mark Parker, bahwa “ *The best innovation comes from inclusive work environments that foster diverse ideas, nurture people with diverse talent and backgrounds, and create strong relationships with diverse communities*”

Desy Maritha¹

References

- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Pearson Education.
- Manar, D. G. (2018). Pembelajaran Inovasi Kebijakan Inklusif. *Jurnal Studi Pemuda*, 14-24.
- Negara, D. S. (2013). Membangun Perekonomian Indonesia yang Inklusif dan Berkemajuan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 39.

¹ **Analisis Kebijakan Ahli Muda Puslatbang KHAN**